

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2009). Mengingat dana yang digunakan berasal dari publik, maka pelayanan dan kepuasan masyarakat menjadi prioritas utama. Penganggaran partisipatif merupakan upaya pendekatan penganggaran yang berfokus untuk meningkatkan motivasi pegawai untuk mencapai tujuan organisasi, serta mengambarkan individu-individu terlibat dalam menyusun anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut (Brownell, 1982) dalam Falikhatun (2007).

Partisipatif merupakan suatu konsep, dimana bawahan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan sampai tingkat tertentu bersama atasannya (Robbins, 2002 : 179). Konsep penganggaran partisipatif sudah lama diterapkan dalam sektor swasta (bisnis), namun tidak demikian pada sektor publik. Yang membedakan di antara keduanya ada pada motif keuntungan yang hendak diperoleh. Partisipasi sektor bisnis (privat) akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari layanan yang diberikan kepada publik, namun pada partisipasi sektor publik hanya memenuhi kebutuhan publik tanpa motif mencari keuntungan.

Penganggaran partisipatif sektor publik mempunyai sistem yang mapan/sesuai berdasarkan UU. RI nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Berdasarkan SPPN penganggaran merupakan suatu proses yang cukup rumit pada organisasi sektor publik, lain halnya dengan penganggaran pada sektor swasta. Pada sektor swasta anggaran merupakan rahasia

perusahaan yang tertutup untuk publik, namun pada sektor publik, anggaran justru harus diinformasikan, di kritik dan di bahas untuk mendapat masukan. UU RI Nomor 25 tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Proses penyusunan anggaran sektor publik disesuaikan dengan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Sebelumnya proses penyusunan anggaran ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah hanya melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan oleh pusat. Setelah dikeluarkan UU no. 32 tahun 2004 yang diubah dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sistem pemerintahan terpusat telah bergeser menjadi sistem otonomi daerah (reformasi anggaran). Hal ini berarti pemerintah daerah diberi kewenangan untuk dapat mengelola daerahnya sendiri, termasuk dalam sistem anggaran. Pergeseran kewenangan ini tentunya juga menyebabkan perubahan pada proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Semula pertanggungjawaban APBD provinsi memerlukan pengesahan Menteri Dalam Negeri dan APBD kabupaten/kota dengan pengesahan Gubernur, maka saat ini pertanggungjawaban APBD hanya memerlukan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Peraturan Daerah (Perda) (Mardiasmo, 2009).

Reformasi anggaran ini mendorong perubahan sistem penganggaran yang mulanya *top-down* menjadi *bottom-up*. pada sistem *top-down*, para bawahan hanya dapat melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan atasan karena seluruh keputusan perencanaan merupakan kewenangan atasan. Selanjutnya pada sistem *bottom-up*, para bawahan diberikan ruang untuk dapat berpartisipasi dalam perencanaan penyusunan anggaran. Hal ini disebut dengan partisipasi anggaran (*budgetary participation*).

Proses penyusunan anggaran partisipatif ini terbilang efektif karena disini terjadi pertukaran informasi yang efektif sehingga besaran anggaran yang disetujui merupakan hasil dari keahlian dan pengetahuan pribadi dari pembuat anggaran yang dekat dengan lingkungan operasi (Anthony dan Govindarajan, 2007). Akan tetapi jika tidak dikelola dengan baik partisipasi penganggaran juga akan berdampak negatif yaitu senjangan anggaran. Senjangan anggaran sendiri merupakan perbedaan antara jumlah anggaran yang diajukan oleh bawahan dengan jumlah estimasi yang terbaik dari organisasi (Anthony & Govindarajan, 2005). Estimasi yang dimaksud adalah anggaran yang sesungguhnya terjadi dan sesuai dengan kemampuan terbaik organisasi.

Senjangan anggaran timbul apabila atasan dalam organisasi tersebut sengaja menetapkan pendapatan terlalu rendah atau menetapkan biaya terlalu besar. Setiap tindakan tersebut menyebabkan atasan dalam organisasi tersebut lebih mudah untuk mencapai anggaran yang ditetapkan dan tidak mendorong untuk bekerja semaksimal mungkin, karena senjangan anggaran menyebabkan kerugian bagi organisasi sehingga kesalahan-kesalahan tersebut perlu dihindari. Banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya senjangan anggaran, diantaranya adalah melalui informasi asimetri, partisipasi penganggaran dan sasaran anggaran yang tidak tepat. Utomo dalam Ompusunggu dan Bawono (2006:2) menyatakan bila partisipasi anggaran tidak dilaksanakan dengan baik dapat mendorong bawahan/pelaksana anggaran melakukan senjangan anggaran. Perilaku negatif yang mungkin timbul adalah kecenderungan atasan untuk menciptakan senjangan dalam anggaran. *Slack*/senjangan anggaran merupakan perbedaan jumlah anggaran yang diajukan oleh bawahan dengan jumlah estimasi terbaik dari organisasi (Anthony dan Govindarajan dalam I Ketut Sujana; 2009: 356). Atasan menciptakan *slack* dengan mengestimasi pendapatan lebih rendah, mengestimasi biaya lebih tinggi, atau menyatakan terlalu tinggi jumlah input yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu unit output. Hal ini dilakukan agar target anggaran dapat dengan mudah dicapai bawahan.

Beberapa peneliti akuntansi menemukan bahwa senjangan anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk diantaranya partisipasi bawahan yaitu manajemen bawah dalam penyusunan anggaran. Adapun Hilton (2008) menyatakan tiga alasan utama manajer melakukan senjangan anggaran : 1. Orang-orang selalu percaya bahwa hasil pekerjaan mereka akan terlihat bagus di mata atasan jika mereka dapat mencapai anggarannya; 2. Senjangan anggaran selalu digunakan untuk mengatasi kondisi ketidakpastian, jika tidak ada kejadian yang tidak terduga, yang terjadi atasan tersebut dapat melampaui/mencapai anggarannya; 3. Rencana anggaran selalu dipotong dalam proses pengalokasian sumber daya.

Fenomena yang terjadi pada Pemerintah Kota Padang pada pencapaian target anggaran pendapatan APBD 2011 menargetkan pendapatan daerah Rp1,174 triliun, Wakil WaliKota Padang Mahyeldi Ansyarullah pada rapat paripurna DPRD Padang, Kamis, 15 September 2011 mengatakan, target pendapatan daerah itu naik Rp118,82 miliar atau 10,12 persen dibanding APBD murni yaitu menjadi Rp1,292 triliun. (<http://www.bisnis-sumatra.com>). Berdasarkan kasus ini dapat kita lihat bahwa target yang ditetapkan dalam APBD murni lebih rendah dari pada yang seharusnya dapat dicapai. Berdasarkan fenomena diatas Pratama (2013) berpendapat Partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan positif terhadap senjangan anggaran.

Selanjutnya senjangan anggaran yang terjadi pada Pemerintah Kota Payakumbuh, mengusulkan belanja daerah tahun 2011 berubah dari 382 miliar rupiah menjadi 425,5 miliar rupiah. Padahal apabila dibandingkan dengan APBD tahun 2010, banyak terdapat kelebihan dana untuk belanja tersebut dengan belanja daerah yang kurang dari 382 miliar rupiah. Perubahan belanja daerah dari 382 miliar rupiah menjadi 425,5 miliar rupiah berpotensi menimbulkan inefisiensi atau pemborosan (Padang Ekspres, Rabu/12 Oktober 2011). Implikasinya, semakin tinggi kecenderungan organisasi pemerintah untuk melakukan senjangan anggaran semakin tinggi pula kecenderungan terjadinya inefisiensi anggaran.

Tahun 2008 kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sidoarjo telah terbukti melakukan senjangan anggaran dari target yang ditetapkan oleh manajemen lebih besar dari pada realisasinya. Target yang ditetapkan oleh manajemen sebesar Rp. 587.601.429.592,67 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 570.454.246.180,01 maka pada tahun ini kinerja DPPKA Kabupaten Sidoarjo kurang baik, hal ini dapat dilihat dari target yang ditetapkan tidak dapat terealisasi semuanya.

Mengacu hasil penelitian yang dilakukan Ramdeen *et.al* (2006), Anggraeni (2008), dan Latuheru (2006), pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini data tentang laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2012, pada bagian pendapatan dari target yang ditetapkan setelah perubahan sebesar 1.184 trilyun rupiah lebih terealisasi sebesar 1.196 trilyun rupiah atau lebih 101,00% sehingga terdapat surplus realisasi pendapatan sebesar 11,89 milyar. Pendapatan asli daerah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar 116,11 milyar rupiah lebih terealisasi sebesar 129.00 milyar rupiah lebih atau 111,10%. Pendapatan transfer target setelah perubahan 1.067 trilyun rupiah lebih terealisasi sebesar 1.066 trilyun rupiah atau 99.89%. Pendapatan lain-lain yang sah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar 725.00 juta rupiah terealisasi sebesar 963,58 juta rupiah lebih atau 128.14%. Dari sisi belanja, terdapat efesiensi pengeluaran sebesar 133,89 milyar rupiah lebih atau 89,35% yaitu dari anggaran perubahan yang ditetapkan sebesar 1.257 trilyun rupiah lebih terealisasi sebesar 1,123 trilyun rupiah lebih atau 89.35% (www.bulelengkab.go.id, diakses tanggal 27/11/13). Dari uraian data di atas terdapat tingkat persentase pencapaian realisasi pendapatan dan belanja daerah dari target anggaran setelah perubahan. Terjadinya senjangan anggaran dapat dilihat setelah anggaran tersebut terealisasi.

Ardhianti (2002) dalam penelitiannya di BUMN-BUMN di Surabaya menjelaskan pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran dengan

menggunakan komitmen organisasi sebagai variabel moderating pada BUMN-BUMN di Surabaya. Berdasarkan penelitiannya dibuktikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh yang positif terhadap senjangan anggaran pada BUMN-BUMN di Surabaya. Hal ini berarti bahwa bila partisipasi penyusunan anggaran naik maka senjangan anggaran naik dan bila partisipasi penyusunan anggaran turun maka senjangan anggarapun turun.

Penelitian Asriningati (2006) dilakukan pada Perguruan Tinggi Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta. Alat analisis yang dipakai regresi linier berganda dan dengan menggunakan sampel 135 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap senjangan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan-perbedaan hasil, dimana partisipasi dapat meningkatkan dan menurunkan senjangan, hal ini dikarenakan perbedaan variabel moderating yang digunakan dalam meneliti hubungan partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran dan perbedaan obyek yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Afiani (2010), Young (1985) dan Falikhatun (2007) menunjukkan bahwa partisipasi yang tinggi dalam proses penyusunan anggaran, dapat menimbulkan senjangan anggaran yang tinggi pula. Namun hasil yang berlawanan ditunjukkan dari penelitian Sujana (2010), Dunk (1993), Supanto (2010), Schiff dan Lewin (1970) yang menunjukkan bahwa partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran dapat mengurangi terjadinya senjangan anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan ada variabel lain mempengaruhi hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan kemungkinan timbulnya senjangan anggaran.

Kebanyakan penelitian dilakukan pada sektor swasta (BUMS), sedangkan pada sektor pemerintahan masih sedikit yang diteliti, sebetulnya pada sektor pemerintahan memiliki karakteristik anggaran yang berbeda. Penelitian ini dilakukan pada sektor

publik dengan mengambil budaya organisasi dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating yang diharapkan dapat mempengaruhi hubungan partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran.

Bukti empiris terkait dengan pengujian hubungan antara partisipasi bawahan dengan senjangan anggaran menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Menurut hasil penelitian Hafsah (2008), Sulistyو (2013), Indriani dan Yusuf (2014), Permanasari (2014), Tambunan dan Kurniawan (2014), Yafie Riandalas (2015) menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kesenjangan anggaran. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadina (2013), Rahmiati (2013) menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh negatif terhadap kesenjangan anggaran, sedangkan hasil penelitian Yuliastuti dan Prabowo (2015) menyatakan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun, (2007) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang masuk dalam kategori midle management level se Jawa Tengah memperoleh hasil bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh positif signifikan terhadap senjangan anggaran. Hasil temuan yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, menunjukkan kemungkinan adanya variabel lain yang mempengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. Govindarajan (1986) menyatakan bahwa mengatasi ketidakkonsistenan hasil-hasil riset tersebut diperlukan pendekatan kontijensi (*contingency*). Pendekatan kontijensi memberikan gagasan bahwa hubungan antara partisipasi anggaran dan senjangan anggaran dipengaruhi oleh berbagai faktor atau variabel yang bersifat kondisional. Salah satu variabel kondisional adalah variabel moderating. Variabel moderating merupakan variabel yang mempunyai pengaruh kontijensi yang kuat pada hubungan variabel independen dan variabel dependen (Sekaran, 2008).

Ghozali (2010) juga mengatakan kemungkinan belum adanya kesatuan hasil penelitian mengenai anggaran dan implikasinya, disebabkan adanya faktor-faktor

tertentu (*situational factors*) atau yang lebih dikenal dengan istilah variabel kontijensi (*contingency variables*). Selain itu Govindarajan (1986) menyatakan bahwa perbedaan hasil penelitian tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan kontinjensi (*contingency approach*). Hal ini dilakukan dengan memasukkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi partisipasi dengan senjangan anggaran. Adanya ketidaksamaan keinginan antara atasan dengan bawahan mengakibatkan terjadinya perilaku disfungsional. Bawahan akan cenderung memberikan informasi yang bias agar anggaran mudah tercapai. Sebagian peneliti menyatakan dengan adanya partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran akan mengurangi kecenderungan terciptanya senjangan anggaran, sedangkan penelitian lain membuktikan secara empiris bahwa atasan yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran cenderung melakukan senjangan anggaran.

Sejalan dengan adanya *research gap* mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ulang dengan memasukkan dua variabel kontijensi yaitu budaya organisasi dan komitmen organisasi. Peran budaya organisasi dan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini merupakan hal menarik untuk diteliti pada instansi sektor publik, karena kedua variabel tersebut diduga sebagai penyebab terjadinya senjangan anggaran.

Budaya Organisasi merupakan perangkat asumsi yang dibagi dan diterima secara implisit serta dipegang oleh satu kelompok yang menentukan bagaimana hal itu dirasakan, dipikirkan dan beraksi terhadap lingkungan yang beragam Kreitner dan Kinicki (2014). Budaya organisasi mempengaruhi cara manusia bertindak dalam organisasi dan itu selaras dengan pendapat Robbin's (2007) bahwa dalam budaya organisasi terdapat sekumpulan asumsi penting mengenai organisasi tersebut dan tujuan-tujuan serta praktik-praktiknya yang dianut bersama oleh semua anggota organisasi tersebut. Budaya organisasi menurut Douglas dan Wier (2000) yang dikutip Yuhertiana (2004) diduga mampu menjelaskan ketidakseragaman pandangan

manajer atas etis tidaknya senjangan anggaran. Sesuai dengan *Theory Agency*, bawahan akan membuat target yang lebih mudah untuk dicapai dengan cara membuat target anggaran yang lebih rendah pada sisi pendapatan, dan membuatajuan biaya yang lebih tinggi pada sisi biaya.

Menurut hasil penelitian Retno (1995) pada organisasi sektor publik, tipe budaya birokratis ditandai dengan adanya lingkungan kerja yang terstruktur, teratur, tertib, dan memiliki regulasi yang jelas, selanjutnya pengawasan yang ketat dalam bentuk penetapan aturan. Menunjukkan garis wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan level organisasi (Falikhatun, 2003). Dengan kata lain budaya organisasi tidak berdampak pada partisipasi penganggaran terhadap senjangan anggaran (Falikhatun, 2007).

Supanto (2010) menguji tentang Analisis Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Budgetary Slack dengan Informasi Asimetri, Motivasi dan Budaya Organisasi sebagai Pemoderasi, studi kasus pada Politeknik Negeri Semarang. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh pejabat atau pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran pada Politeknik Negeri Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. sehingga dapat dikatakan bahwa budaya organisasi bukan merupakan variabel yang memoderasi pada pengaruh partisipasi penganggaran terhadap senjangan anggaran. Dalam hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Hafsah (2008), Sulisty (2013), Indriani dan Yusuf (2014), Permanasari (2014), Tambunan dan Kurniawan (2014), Yafie Riandalas (2015) yang menyatakan budaya organisasi berpengaruh terhadap hubungan partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran.

Penelitian Ningrum (2009) tentang Pengaruh Interaksi Budaya Organisasi, Informasi Asimetri dan *Group Cohesiveness* dalam Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Senjangan Anggaran. Survey pada Rumah Sakit di Kabupaten Klaten. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh manajer yang bekerja pada rumah sakit

di wilayah Kabupaten Klaten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Baiman (1982), Dunk (1993), Yuwono (1999) dan Darlis (2002) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. Interaksi budaya organisasi pada partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran, artinya interaksi budaya organisasi akan memperlemah hubungan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran.

Komitmen organisasi menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (*goal*) yang ingin dicapai oleh organisasi (Mowday *et al*, 1979) dalam Latuheru, 2006. Hasil penelitian Ikhsan dan Ane (2007) menyatakan bahwa komitmen organisasional mampu memoderasi pengaruh anggaran partisipatif pada senjangan anggaran. Sementara dalam penelitian Desmiyati (2009) menyatakan bahwa interaksi anggaran partisipatif dan komitmen organisasional berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada senjangan anggaran. Hal serupa dengan penelitian yang dilakukan Minan (2005) menyatakan bahwa komitmen organisasional tidak mempengaruhi hubungan antara anggaran partisipatif dengan senjangan anggaran.

Penelitian Latuheru (2005) menunjukkan bukti empiris bahwa komitmen organisasi mempunyai pengaruh negatif terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. Dari hasil penelitian-penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan hasil temuan disebabkan penggunaan variabel-variabel yang berbeda untuk diinteraksikan dengan partisipasi anggaran dalam menjelaskan terjadinya senjangan anggaran. Dalam hal ini penulis menguji kembali budaya organisasi dan komitmen organisasi sebagai variabel yang dapat memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran.

Yuliastuti dan Prabowo (2015) menyatakan bahwa peningkatan atau penurunan senjangan anggaran tergantung pada sejauh mana individu lebih mementingkan diri sendiri atau bekerja demi kepentingan organisasinya yang merupakan aktualisasi dari

tingkat komitmen yang dimilikinya. Hasil penelitian tersebut berhasil membuktikan bahwa komitmen organisasi yang tinggi berpengaruh signifikan serta mampu memperlemah hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan senjangan anggaran, sehingga komitmen organisasi yang tinggi akan mengurangi individu untuk melakukan senjangan anggaran.

Hasil penelitian Nouri dan Parker (1996) dalam Prabowo (2015) menunjukkan bahwa naik atau turunnya senjangan anggaran tergantung pada individu memilih untuk mengejar kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan organisasi. Komitmen yang tinggi menjadikan individu peduli dengan nasib organisasi dan berusaha menjadikan organisasi ke arah yang lebih baik, sehingga komitmen organisasi yang tinggi akan mengurangi individu untuk melakukan senjangan anggaran.

Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk membuktikan secara empiris apakah dengan adanya partisipasi anggaran yang tinggi pada suatu organisasi sektor publik dapat berpengaruh pada senjangan anggaran. Selanjutnya dengan adanya komitmen organisasi dan budaya organisasi sebagai pemoderasi dapat mempengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran ?
2. Apakah komitmen organisasi memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran ?

3. Apakah budaya organisasi memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengenai pengaruh partisipasi anggaran, komitmen organisasi, budaya organisasi terhadap senjangan anggaran pada organisasi sektor publik yang bertujuan untuk:

1. Mengetahui apakah partisipasi anggaran akan berpengaruh terhadap senjangan anggaran.
2. Mengetahui apakah komitmen organisasi berfungsi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran.
3. Mengetahui apakah budaya organisasi berfungsi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman terhadap organisasi sektor publik, khususnya mengenai penganggaran sektor publik pada bidang akademik dan dapat dijadikan referensi serta gambaran mengenai peranan partisipasi anggaran sektor publik pada penelitian serupa mengenai masalah ini di masa mendatang.

2. Bagi Praktisi

Memberikan wacana alternatif bagi praktisi mengenai penganggaran yang efektif dalam perencanaan kegiatan pemerintahan organisasi sektor publik. Selain itu diharapkan dapat menerapkan kebijakan yang sesuai untuk mendukung dan memperlancar aktivitas organisasi, terutama dalam bidang anggaran.

3. Bagi pembaca.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan serta mempelajari masalah-masalah yang terkait dengan partisipasi anggaran dalam hubungannya dengan senjangan anggaran yang melibatkan budaya organisasi dan komitmen organisasi sebagai pemoderasi.

4. Bagi peneliti

Sebagai bahan untuk memperkuat penelitian sebelumnya serta dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam mengadakan kajian lebih lanjut terhadap masalah ini.